LAPORAN PENGABDIAN BERBASIS RISET

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA BALE BUNGO (OXYELEOTRIKS MARMORATA) SEBAGAI OLEH-OLEH KHAS KOTA SENGKANG, KABUPATEN WAJO.

Disusun oleh :

Dr. Sitti Jamilah Amin,M.Ag (Ketua Peneliti)

An Ras Try Astuti,ME (Anggota Peneliti)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian :Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Pengembangan Usaha Bale Bungo (Oxyeleotriks Marmorata) sebagai Oleh-Oleh Khas Kota Sengkang, Kabupaten Wajo.

Ketua Peneliti

a. Nama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag
b. NIP/NIDN : 197605012000032002/ 2001057604
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program studi : Perbankan Syariah
e. Disiplin ilmu : Pemikiran Islam
f. No. HP : 082337091384
g. Alamat Email : jamilah.amin76@gmail.com
h. Kluster penelitian : Pengabdian Berbasis Riset

Anggota Peneliti

a. Nama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag
b. NIP/NIDN : 19901223 201503 2 004
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program studi : Perbankan Syariah
e. Disiplin ilmu : Ekonomi Mikro/Makro Islam
f. No. HP : 082291922141
g. Alamat Email : anrastryastuti@iainpare.ac.id
h. Kluster penelitian : Pengabdian berbasis riset

Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-

Parepare, 3 Desember 2019

Ketua LP2M

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 199103 2 004

Peneliti

Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag
NIP. 19760501 200003 2 002

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

ABSTRAK

Ikan Bungo (*oxyeleotris marmorata*) merupakan ikan unik, karena hanya terdapat di Perairan danau 3ransform memiliki bentuk yang tipis sehingga ikan ini sering juga disebut “Ikan Kertas”. Menurut Majalah GeoMagz, ikan bungo (*oxyeleotris marmorata*) berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Karena selain unik, ikan bungo juga digemari oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di tiga Kabupaten (Wajo, Soppeng dan Sidrap). Atas dasar potensi tersebut, Ikan Bungo sangat cocok untuk dijadikan sebagai produk oleh-oleh khas kota Sengkang. Menjadikan ikan bungo (*oxyeleotris marmorata*) sebagai produk oleh-oleh akan meningkatkan nilai jual ikan tersebut, sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan anggota kelompok mitra. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah ikan bungo menjadi produk oleh-oleh yang bernilai tambah ekonomis. Oleh karena itu, solusi yang akan ditawarkan dalam program kemitraan ini adalah melakukan peningkatan kapastitas anggota kelompok. Melalui serangkaian pelatihan dan *focus group discussion* (FGD). Adapun metode pelaksanaan program kemitraan ini adalah metode PAR (Participatory action research). Metode PAR adalah metode penelitian pengabdian masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang sering digunakan oleh peneliti untuk melahirkan aksi-aksi 3ransformative, dimana masyarakat adalah pelakunya sendiri.Terdapat tiga pilar utama dalam metode PAR yaitu aksi, partisipasi dan riset. Anggota kelompok yang didampingi dalam program pengabdian ini, akan dilatih secara partisipatif untuk menetapkan standar kualitas mutu produk oleh-oleh ikan bungo, desain kemasan, pemasaran berbasis *E-Marketing,* dan pelatihan pengembangan usaha bersama berbasis kelompok (KUBE).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....1

HALAMAN PENGESAHAN.....2

ABSTRAK.....3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....6
B. Alasan Memilih Subyek Dampingan.....9
C. Fokus Pendampingan.....10
D. Tujuan Riset Pendampingan.....11
E. Manfaat Riset Pendampingan.....11
F. Metode Pendampingan.....11
G. Langkah-Langkah Pendampingan.....11
H. Pihak-pihak yang akan dilibatkan dan bentuk keterlibatannya.....16
I. Resources yang dimiliki.....19

BAB II KONDISI AWAL PEREMPUAN NELAYAN DESA ASSORAJANG KEC.TANASITOLO, KABUPATEN WAJO

A. Letak Geografis Kabupaten Wajo.....20

BAB III PROSES PENDAMPINGAN PEREMPUAN NELAYAN DESA ASSORAJANG KEC.TANASITOLO, KABUPATEN WAJO.

A. Perencanaan Kegiatan Pendampingan.....46
B. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan.....47

BAB IV PERUBAHAN DAN HASIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN BALE BUNGO , DESA ASSORAJANG, KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO.

A. Membentuk Komunitas Istri Nelayan.....62
B. Pelatihan Keterampilan.....63
C. Sosialisasi Desain Kemasan.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....66
B. Rekomendasi.....67

DAFTAR PUSTAKA.....68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pemerintah mengambil kebijakan penanggulangan kemisiknan yang sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.Ada dua pendekatan penanggulangan kemisiknan yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Yaitu: pertama, pemerataan infrastrukutr. Infrastrukut merupakan sarana penggerak ekonomi yang sangat efektif.Dari aspek kesejahteraan, masyarakat dikota pada umumnya lebih sejhtra merupakan akibat pembangunan infrastrukur yang tidak merata.Saat ini, infrarturutr terkonsentrasi dipulau Jawa.Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara penduduk pulau jawa dengan penduduk diluar pulau jawa.Meskipun, tidak secara langsung memberikan dampak terhadap pengurangan jumlah kemisiknan. Namun, pembangunan infrastruktu diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatakan jumlah penduduk yang bekerja sehingga angka kemisiknan dapat bekurang.

Kedua.Pemberdayaan masyarakat.Pembangunan infrastrukt yang massif hanya dapat berperan efektif dalam mengurnagi angka kemisikinan jika masyarakat memiliki keterampilan untuk memanfaatkan keberadaan infrastrukurut tersebut.oleh karena itu, program pemberdayaan merupakan program pengentasan kemiskinan yang efektif untuk mengurnagi angka kemisiknan.

Kebijkana tersebut disahkan melalui Undang-undang no 24 tahun 2016 tentang desa.Undang-undang tersebut dirancang dengan pertimbangan bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan tradisional untu mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan karakteristik dan potensi ekonomi dan social desa tersebut. Dari pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah pusat telah menyadari akan pentingnya keberadaan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewengan

kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing.

Terbitnya undang-undang desa juga berimplikasi pada keuangan desa. Dalam undang-undang tersebut anggaran desa diperilh dari penghasilan asli desa (PADes), alokasi APBN, bantuan dari APBP/APBD dan dana hibah. Kemudian pada pasal 74 disebutkan bahwa belanja dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembanginan sarana dan prasarana (infrasrturkur), pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rancangan UU tersebut, alokasi dana desa baik dari pusat maupun daerah diharapkan dapat menjadi stimulus desa untuk meningkatkan kemandirian desa dengan cara menciptakan sumber-sumber pendapatan asli desa. Dengan konsep tersebut, idealnya anggaran dana desa dibelanjakan untuk meningkatkan sector-sektor produktif seperti mengmbangkan produk unggulan desa yang mampu menjadi stimulus kemandirian ekonomi masyarakat desa tersebut.

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat berperan serta dalam penuranga kemisikinan masyarakat desa adalah Pendampingan Perempuan nelayan bale bungo

Berdasarkan hasil kajian kelembagaan di desa assorajang terdapat beberapa kelembagaan, antara lain;

1. Pemerintahan Desa
2. Kelompok Pemuda
3. LPMD
4. PKK
5. BPD
6. Majelis Taqlim
7. Badan Kerjasama Daerah
8. Kelompok olahraga
9. Kelompok Tani
10. Kader Kesehatan
11. Imam Desa

12. Penyuluh pertaniab/gapoktan
13. Karang taruna
14. Guru
15. RT/RW
16. Kelompok perempuan
17. Kelompok nelayan
18. Hansip
19. Guru Mengaji
20. Sekolah
21. Poskesdes

Berdasarkan fakta lapangan yang dikemukakan diatas, kami melihat bahwa solusi yang dapat diambil untuk membantu komunitas perempuan nelayan meningkatkan pendapatan mereka adalah dengan mengolah dan mengembangkan ikan Bungo (*oxyeleotris marmorata*) menjadi Produk oleh-oleh khas kota sengkang yang memiliki nilai tambah ekonomis. Ada dua keunggulan yang didapatkan jika mendesain Ikan Bungo menjadi produk Oleh-oleh khas kota sengkang. Pertama, nilai jual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai jual ikan dipinggir jalan.Kedua, area pemasarannya dapat diperluas dengan menggunakan fasilitas sosial media dan aplikasi jual beli online tanpa dibebani oleh biaya promosi.

Dari penelusuran tehadap situs-situs jual beli online.Terdapat satu penjual di aplikasi bukalapak.com yang menjual Ikan bungo dengan kemasan yang menarik dan dipasarkan dengan harga seharga Rp.35.000/pcs.Jika dibandingkan dengan harga jual dipasar, maka harga jual di situs jual beli online jauh lebih tinggi. Ini adalah potensi yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok perempuan Nelayan Mattirotappareng, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Danau Tempe merupakan danau terluas di Sulawesi Selatan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidenreng Rappang.Para nelayan tersebut tergabung dalam kelompok kelompok nelayan dengan wilayah masing-masing. Salah satu kelompok nelayan adalah Kelompok perempuan nelayan yang berdomisili di Kelurahan Mattiotappareng Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Pada umumnya, perempuan nelayan merupakan ujung tombak perekonomian keluarga dengan berjualan ikan kering di pinggir Jalan raya perbatasan Kota Sengkang yang menuju Kabupaten Sidrap.Lokasi tersebut memang strategis untuk berjualan mengingat lalu lintas kendaraan yang padat, baik menuju Kabupaten Sidrap maupun yang ingin masuk ke Kota Sengkang.Selain itu, tempat tersebut dapat dengan mudah diakses oleh perempuan nelayan karena dekat dari pesisir Danau Tempe dimana mereka berdomisili.

B. Alasan memilih subyek dampingan

Desa Assorajang sebagai subjek dampingan dikarenakan di desa tersebut masih banyak dijumpai masyarakat nelayan yang hidup dari mengais rejeki di danau Tempe.

Ikan kering yang dijual oleh kelompok perempuan nelayan Mattirotappareng terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari Ikan Mujair (*oreocrhomis mossambicus)*, Ikan Gabus (*channa striata*), Ikan Mas (*cyprinus carpio*), hingga ikan Bungo (*oxyeleotris marmorata*).Berdasarkan hasil pengamatan awal kami, dari berbagai jenis ikan kering yang dijual, ikan bungo (*oxyeleotris marmorata*) adalah ikan yang paling digemari oleh pembeli.Karena dari beberapa kali observasi, sebagian besar pembeli yang dijumpai lebih memilih untuk membeli Ikan tersebut dibanding ikan lainnya.Alasan konsumen menggemari ikan tersebut, dikarenakan Ikan Bungo (*oxyeleotris marmorata)* memiliki rasa yang enak, dan bentuknya yang tipis membuat ikan ini dapat dikonsumsi sebagai cemilan/kerupuk.Majalah GeoMagz pada 2015 yang lalu memberikan ulasan bahwa ikan ini berpotensi menjadi salah satu sumber penghasilan daerah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, karena

digemeri tidak hanya oleh penduduk setempat.Namun, juga digemari oleh masyarakat di berbagai daerah.

Akan tetapi, meski konsumen menggemari ikan bungo (*oxyeleotris marmorata*), hal ini tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan nelayan pengerajin ikan kering.hal tersebut dikarenakan nilai jual ikan bungo (*oxyeleotris marmorata*) yang rendah dan biaya operasional yang tinggi. nilai jual ikan tersebut hanya berkisar antara Rp. 10.000 - Rp. 15.000/Kg. sementara biaya operasional yang dibutuhkan untuk proses pengolahan ikan kering mulai dari penangkapan hingga pengeringan berkisar Rp. 8.000 - 12.000/Kg. selain itu, jumlah anggota komunitas yang menjual produk serupa berjumlah sekitar 30 orang menyebabkan distribusi pendapatan menyebar ke anggota komunitas. jadi meskipun kelihatannya ramai pembeli, namun pada dasarnya penjualan mereka tidak banyak.

Melihat rata-rata usia masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata mereka masih berada dalam usia produktif dalam artian, mereka masih bisa berporduksi untuk memenuhi kebetuhannya. Hanya saja, persaingan bisnis diantara mereka dan pengusaha luar menyebabkan hasil nelayan mereka kadang tidak begitu membuahkan keuntungan besar.

Di sisi lain, desa tersebut memiliki sumber daya yang dapat membantu mereka untuk berinovasi melalui kegiatan pemberdayaan.

C. Fokus Pendampingan

Dari penjelasan penelitian diatas, maka Fokus pendampingan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses penguatan Kelompok Perempuan nelayan dalam membangun kemandirian ekonomi pada desa assorajang, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten wajo?

D. Tujuan Riset Pendampingan

Tujuan riset pendampingan ini adalah untuk mengetahui bagaimana memberdayakan Kelompok Perempuan nelayan dalam membangun kemandirian ekonomi pada desa assorajang, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten wajo?

E. Manfaat Riset Pendampingan

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan terkait topik membangun kemandiran ekonomi dan pemberdayaan kelompok perempuan nelayan bale bungo.

b. Sebagai pengembangan keilmuan jurusan ekonomi

2. Manfaat praktis

a. Dapat menjadi bahan masukan bagi stakeholder terkait untuk program pembangunan kemandiran ekonomi

b. Dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan tambahan referensi.

F. Metode Pendampingan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berbasisi partisipasi yang dikenal dengan istilah *Participatory action research* (PAR). Pada awalnya, Metode PAR dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin pada pertengan Tahun 1900an yang kemudian dikembangkan oleh Paulo Freire seorang filosof dibidang Pendidikan sebagai kritiikan terhadap model Pendidikan tradisional yang menampatkan seorang guru sebagai sumber dan otoritas utama pengetahuan[1].

Menurut Chambers[2], PAR merupakan metode baru yang diangkat dari tradisi kearifan local (local wisdom) yang menjadi dasar paradigm ilmu pengetahuan kualitatif. Par berangkat dari asumsi yang menenakn pada pentingnya proses sosial dan keterlibatan kolektif dalam merumuskan apa yang disebut dengan “kasus yang saat ini terjadi” dan implikasi perebuahannya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang sedang berada dalam situasi tersebut.

---

[1]Rambo Cronika Tampubolon, https://www.bantuanhukum.or.id/web/participatory-action-research-par/

[2] Chambers,Robert. PRA Memahami Desa Secara Partisipatif, (Yogyakarta : KANISUS, 1996).

Secara prinsip, PAR adalah metode riset yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak yang memiliki sumber daya untuk mengkaji tindakan yang sedang terjadi dan bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik.Tahapan PAR dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.analisis terhadap akar permasalahan sosial, merupakan pintu masuk untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang ada.

Dengan*ParticipatoryAction Research*(PAR)inibermanfaatuntukmemfasilitasi danmemotivasiagarmasyarakat mampu:

1. Mengidentifikasikekuatandankelemahanmasyarakat diKelurahan Tanasitolosertaproblematikanya.

2. Menemu kenalifaktorpenyebabproblemmasyarakat danalternatifsolusinya.

3. Menyusunstrategidanmetodeyangtepatuntukmemecahkanpermasalahan

4. Menyusunrencanaaksiberdasarkan prioritas,dankeberlanjutanprogram melaluitahapan-tahapanhinggamencapaitargetyangdiharapkan

G. Langkah-Langkah Pendampingan

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan dalam kegiatan pendampingan ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder khususnya masyarakat miskin dengan terlebih dahulu melakukan survey kebutuhan masyarakat serta potensi yang mereka miliki kemudian melaksanakan langkah-langkah pedampingan yaitu;

1. Inkulturasi

Inkulturasi merupakan proses menyesuaikan diri dengan budaya dan norma-norma sosial masyarakat setempat. Proses inkulturasi disebut sebagai strategi pendampingan dikarenakan, masyarakat pada umumnya enggan untuk terlibat

dalam suatu kegiatan jika masyarakat merasa tidak terlalu mengenal penyelenggara kegiatan tersebut. karena itu, maka sangat penting bagi peneliti malakukan pendekatan terhadap masyarakat sebelum memulai proses pendampingan.

Inkulturasi dilakukan pertama dengan berkunjungan kerumah para stakeholder terkait, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kelompok Perempuan dan beberapa masyarakat setempat. Dalam proses berkunjung ini, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti yaitu untuk melakukan pendampingan masyarakat, kemudian berdiskusi ringan mengenai kondisi desa saat ini, permasalahan apa yang dihadapi, dan bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut. dalam proses pendampingan, diskusi ringan langsung berhadapan dengan masyarakat merupakan media paling efektif untuk mendapatkan informasi.

Kunjungan kerumah stakeholder desa dan masyarakat tidak hanya dilakukan sekali saja.Tapi untuk menciptakan keakraban dan kepercayaan, kunjungan dilakukan beberapa kali.Meskipun topik diskusi tetap berkisar permasalahan yang dihadapi desa.Namun setiap diskusi senantiasa memunculkan informasi-infomasi baru yang sangat penting untuk keperluan menyusun agenda pendampingan.

Karena keterbatasan sumber daya dan waktu penelitian, maka kunjungan kerumah para stkaholder dan masyarakat mesti dikunci dengan meminta persetujuan dari stakeholder desa untuk melakukan kegiatan pendampingan.Dan tidak lupa, mereka diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan nantinya.

2. Membangun kesepahaman para Stakeholders Desa.

Setelah proses inkulutrasi selesai, maka pendampingan beranjut ketahap membangun kesepahaman dengan para staholder desa tentang agenda pendampingan. Kesepahaman yang dimaksud adalah focus pendampingan dan komunitas masyarakat yang akan didampingi serta mekanisme pelibatan badan usaha milik desa dalam proses pendampingan. Focus pendampingan adalah

membangun kemandirian ekonomi, yang berarti dalam proses pendampingan nantinya, masyarakat akan dilatih bagaimana membangun kemandiran ekonomi agar kesejahteraanya dapat meningkat.

3. Menganalisis penyebab masalah kemiskinan di desa

Peneliti bersama para stkaeholders desa mendikusikan melalui forumd diskusi (FGD) tentang permasalahan kemiskinan desa dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, akar permasalahan hinga dampak yang ditimbulkan dari akar permasalahan tersebut.

4. Menyusun rencana pemecahan Masalah melalui FGD

Setelah melakukan analisisi akar permasalahan kemisikinna, peneliti beserta para stakeholders menyusun rencana pemecahan masalah dengan mengidentifikasi setiap potensi, yaitu potensi manusia (Pendidikan, pengalaman dan keahlian), potensi alam, asset keuangan desa, infrastruktur dan jaringan sosial.

5. Mengorganisir Potensi Desa melalui FGD

Setelah melakukan analisis terhadap potensi desa, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisir potensi-potensi tersebut khususnya pada potensi manusia dan jaringan sosial yang dimiliki.Pengorganisasi dilakukan melalui mekanisme FGD yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

6. Penguatan Kelembagaan melalui workshop/Pelatihan

Lembaga merupakan institusi yang dapat dijadikan motor penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, setelah melakukan pengorganisasi terhadap potensi-potensi yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penguatan Perempuan belayan melalui pelatihan penguatan kelembagaan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki.

7. Melaksanakan aksi program pemecahan masalah kemiskinan melalui Pemberdayaan perempuan

Rencana pemecahan masaah kemudian dilaksanakan dengan melibatkan setiap elemen baik apparat desa, Perempuan dan komunitas maysrakat dampingan.

8. Evaluasi dan penetapan RTL.

Agar pendampingan dapat berlanjut, maka peneliti bersama masyarakat menetapkan rencana tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemerintah desa.

Skema1

AlurKegiatan Pendampingan

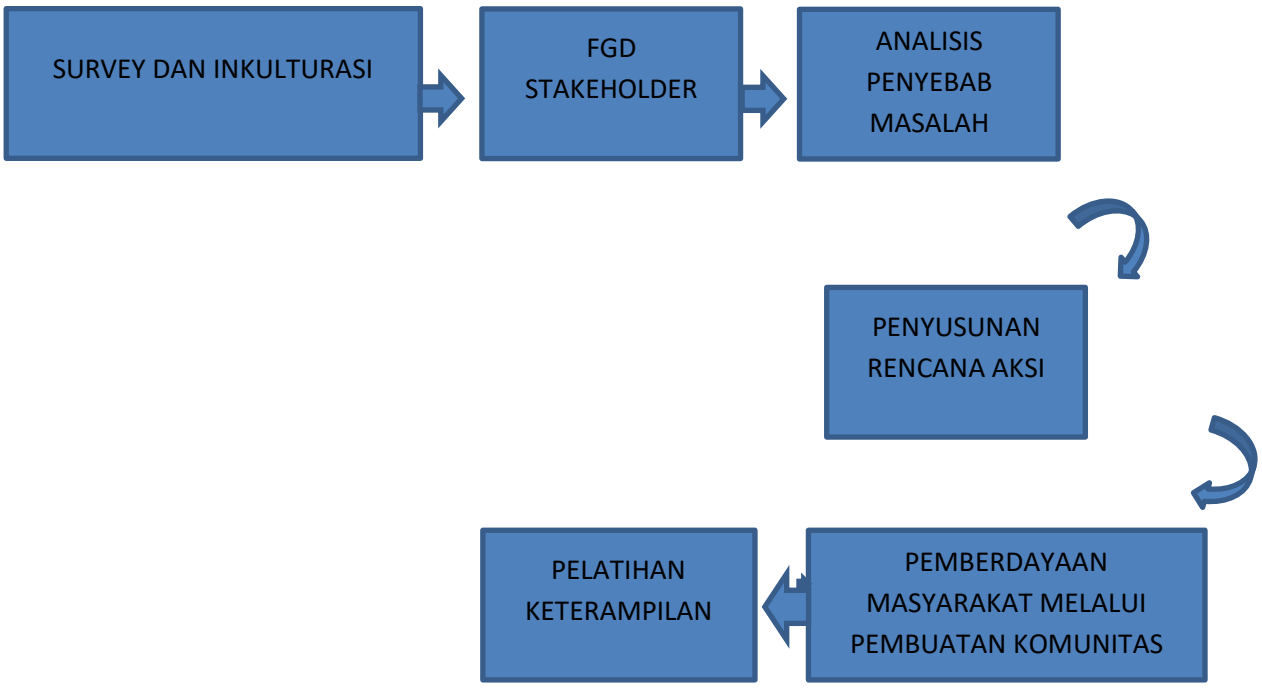

Alur diatas menggambarkan tentang desain aktivitas peneliti selama melaksanakan pendampingan perempuan. Setiap tahapan alur sesuai dengan teori yang digunakan peneliti .

Kegiatan observasi telah dilaksanakan sebelum penelitian ini diajukan .observasi dilakukan kabupaten wajo. informasi didapatkan langsung setelah wawancara dengan pengusaha setempat .

"Disini terdapat 2 Kelompok Perempuan, Kelompok Anugrah dan Sipkalebbi " kata ibu sinta selaku Istri nelayan bale bungo

Selanjutnya peneliti mencari informasi via telpon kepada kepala kelurahan, dan mendapat rekomendasi untuk mendampingi Perempuan diKelurahan Tanasitolo.kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion dengan stakeholder setempat yaitu ; masyarakat , pengurus desa dan perempuan nelayan bale bungo . Setelah melaksanakan FGD, peneliti memilih dan memilah penyebab masalah yang terjadi dilokasi dampingan kemudian bersama tim peneliti lainnya melaksanakan penyusunan rencana aksi . Dari tahap FGD, masyarakat meminta peneliti untuk melaksanakan pendampingan keagamaan kepada masyarakat dan pelatihan keterampilan

H. Pihak-Pihak yang akan dilibatkan dan bentuk keterlibatannya

1.Tim Peneliti

a.PengumpulData

Peneliti melakukan pengumpulan data-data tentang kondisi masyarakat diKelurahan Tanasitolo secara umum melalui wawancara kepada Sekertaris diKelurahan Tanasitolo tentang kondisi perekonomian masyarakat khususnyamasalah-masalahyangdihadapi, budaya dan interaksi sosial yang dibangun dalam pergaulan sehari-hari, potensi-potensi alam dan masyarakat yang dapat dikembangkan melalui penelitian ini, dengan harapan dapat membantu mengubah kondisi masyarakat yang lebih objektif.

Pada tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan data melalui *FocusGroup Discussion*(FGD) yang diikuti oleh *stakehoders* diKelurahan Tanasitoloyang terdiridari:Kepala Desa, Kepala kelurahan dan tokoh masyarakat.

Data-data yang dikumpulkan melalui FGD ini berupa identifikasi masalah remaja yang mencakup; *Pertama*, isu-isu kritis diseputar kondisi masyarakat ; *Kedua,* kontribusi pemikiran para stakeholders tentang alternatif-alternatif solusi sesuai denganisu-isukritis masyarakat yang akan didampingi; *Ketiga,*bentuk-bentuk kegiatan yang diharapkan guna perbaikan kondisi perekonomian masyarakat

b.Pembuat Desain Aksi

Setelah survey awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah perempuan nelayan diKelurahan Tanasitolo melalui wawancara dengan *stakeholders* utama yaitu sekertaris diKelurahan Tanasitolo, peneliti kemudian dilanjutkan dengan FGD sebagaimana di atas, peneliti melakukan klasifikasi masalah berdasarkan hasil diskusi sebagai bahan penyusunan rencanaaksi dilapangan. Pembuatan desain kegiatan ini meliputi bentuk kegiatan yang dipilih,tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, output dan outcome yang diharapkan,kerjasama dengan pihak- pihak terkait, penanggungjawab kegiatan dan waktu serta tempat kegiatan.

c.Pelaksana Kegiatan Pendampingan

Berdasarkan desain aksi yang telah disusun di atas,peneliti melakukan pendampinganmasyarakat melalui Permberdayaan perempuan ,kegiatan-kegiatan yang dipilih sesuai dengan kesepakatan hasil *focus group discussion* (FGD) yaitu terdiridari kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan , pembinaan keagamaan dan pembuatan modul diklat. Rekayasasosial untuk membina dan memberdayakan potensi masyarakat ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Tanasitolo melalui pengembangan yang sesuai dengan kreatifitas nya masing-masing. Lebih lanjut diuraikan dalam pembahasan bagian berikutnya.

d. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau dampak dari kegiatan pendampingan yang dilakukan, kendala-kendala yang terjadi dan alternative solusi sebagai strategi perbaikan kegiatan selanjutnya. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan,peneliti menggunakan; melakukan wawancara lebih mendalam tentang kegiatan yang mereka ikuti, hikmah dan perubahan *mindset* apa saja yang mereka peroleh sertasaran-saran untukperbaikankegiatan padasiklusberikutnya;

e. PembuatDesainTindakLanjut.

Setelah memperoleh hasil monitoring dan evaluasi, peneliti melakukan diskusi bersama *stakeholder* berdasarkan temuan untuk menyusun desain tindak lanjutdari kegiatan yang telah dilaksanakan.Kegiatantindaklanjutberbentuk kegiatan pada siklus berikutnya, dan juga kegiatan lanjutan pasca pendampingan sehingga mereka mampu secara mandiri melakukan pemberdayaan oleh mereka dan untuk mereka sendiri.

2. Partnership

Partnership secara harfiah berarti kemitraan.Sedangkan secara istilah, partnership adalah hubunganyang dibangunantarabeberapaindividuataugrup yang didasari oleh kerjasama dan tanggungjawab yang sama dalam menggapai tujuan tertentu. Partnership mengandung pengertian adanya interaksi dan interlasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner".Kemitraan adalah proses pencarian/ perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang mencapai kepentingan bersama. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Semua pihak yang bermitra harus memperoleh manfaat dan benefit yang sama sesuai dengan kesepakatan kemitraan. Tidak boleh kemudian munculpihak-pihak yang bermitra tidak dapat mengambil manfaat dari kemitraan yang dibangun atau bahkan hanya mendapatkan kerugian.

Dalampelaksanaan kegiatan penelitian,dengan menggunakan metode pengabdian/dampingandenganprinsip kemitraan, peneliti bisa mengusung suatuprogramkerjayangbermitradenganpemerintahsetempat, Perempuan ,industri,kesehatan, organisasikemasyarakatandanlembaga lainnya.

Partnershipmemilikibeberapaprinsipyang mestidanharus terimplementasikan secarakongkritdidalamnya,yaitu sebagaiberikut

1. Tenaga profesional yang akan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada elemen-elemen pengelola dan pengurus lembaga;
2. Pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat miskin yang akan berperan aktif dalam kegiatan;
3. LPPM IAIN Parepare yang akan memberikan dukungan berupa fasilitas yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program

I. Resources yang dimiliki

Adapun Resources yang dimiliki adalah peneliti/pendamping yang dilibatkan dalam pendampingan ini merupakan dosen yang memiliki pengalaman dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu pusat penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM IAIN Parepare memiliki tenaga pendamping lapangan yang dapat membantu dalam operasional kegiatan.

Dr. Sitti jamilah Amin,M.Ag sebagai ketua tim adalah dosen pemikiran yang memiliki latarbelakang disiplin ilmu ushuluddin yang pernah terlibat dalam penelitian pengabdian masyarakat berbasis masyarakat marginal yang diselenggarakan oleh diktis.

AN Ras Try Astuti,ME sebagai anggota tim juga merupakan dosen pada bidang ilmu ekonomi islam. Ia memiliki *concern* pada isu ekonomi mikro dan makro.

Selain hal tersebut diatas, penelitian ini juga melibatkan juga mahasiswa sebagai pembantu lapangan.

BAB II KONDISI AWAL PEREMPUAN NELAYAN DESA ASSORAJANG KEC.TANASITOLO, KABUPATEN WAJO

A. Letak Geografi Kabupaten Wajo.

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan batas-batas wilayah serta gambaran tentang Bappeda, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD.

3.1. Keadaan dan Potensi Daerah Kabupaten Wajo

3.1.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Sengkang, dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak antara $3^0$39” lintang selatan dan $119^0$53” - $120^0$27” bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Wajo ± 2.506,19 km^2 (250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kab. Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Kab. Soppeng dan Kab. Bone
Sebelah Barat : Kab. Soppeng dan Kab. Sidrap

Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2007 Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 Kecamatan, yang di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
1	Sabbangparu	137.75	5.3

o	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kabupaten
	Tempe	38.27	1.53
	Pammana	162.1	66.47
	Bola	220.13	8.78
	Takkalalla	179.76	7.17
	Sajoanging	167.01	6.66
	Penrang	154.9	6.18
	Majauleng	225.92	9.01
	Tanasitolo	154.6	6.17
0	Belawa	172.3	6.88
1	Maniangpajo	175.96	7.02
2	Gilireng	147	5.87
3	Keera	368.36	14.7
4	Pitumpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		**2.506.19**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Secara keseluruhan terbentuk 48 wilayah yang berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus desa. Kecamatan Kera merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 368.36 km^2 , sedangkan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 38.27 km^2 .

Tabel 3.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo

o	Kecamatan	Desa	Kelurahan
	Sabbangparu	12	3
	Tempe	-	16
	Pammana	13	2
	Bola	10	1
	Takkalalla	11	2
	Sajoanging	6	3
	Penrang	9	1
	Majauleng	14	4
	Tanasitolo	15	4
	Belawa	6	3
0	Maniangpajo	5	3
	Gilireng	8	1
1	Keera	9	1
	Pitumpanua	10	4
2			
3			
4			
	JUMLAH	128	48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Sebagaimana lazimnya yang terjadi di sebagian besar daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang tak luput dari perkembangan segala aspek, termasuk dalam perkembangan dalam wilayah kabupaten, bahwa penggunaan lahan untuk pekarangan atau lahan bangunan dan halaman sekitarnya selalu mengalami perluasan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Wajo yang pada saat ini luas lahan

bangunan yang sudah mencapai 12,036 Hektar atau 15 % dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Wajo.

Fenomena ini terkait dengan potensi daerah serta didukung oleh letak geografisnya yang strategis di Sulawesi Selatan dan juga terkenal dengan julukan Kota Dagang yang secara jelas akan menentukan terhadap meluasnya penggunaan lahan untuk pemukiman.

3.1.2. Keadaan Alam dan Iklim

Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi "*Mangkalungu ribulu`e, Massulappe Ripottanangng`e, Mattodang Ritasi`e"* yang artinya Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi utama, yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke Utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah hutan tanaman industry, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente, serta pengembangan ternak.
2. Tanah daratan rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah, dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Disebelah timur merupakan wilayah potensial yang digunakan untuk pengembangan perikanan budi daya tambak. Selain itu Kabupaten Wajo juga mempunyai potensi sumber air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang terdapat di sungai-sungai besar (Sungai bila, Walennae, Gilireng, dan Awo) yang ada. Sungai ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan penyediaan air bersih.

Dari luas wilayah Kabupaten Wajo 2.506,19 km^2, penggunaan untuk sawah 86.142 hektar (34,37%) dan 164.477 hektar (65,63%) lainnya adalah lahan kering (non-sawah).Data Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk pertanian di Kabupaten Wajo, terbesar kedua setelah Kabupaten Bone. Dari keseluruhan luas lahan sawah, mayoritas sawah diairi secara tadah

hujan (65.083 hektar), sedangkan sisanya adalah pengairan tekhnis (7.950 hektar), dan pengairan setengah teknis (587 hektar). Untuk lahan kering, penggunaan terbesar adalah untuk tanah tegal, kebun, ladang dan huma (52.935 hektar), sisanya adalah lahan perkebunan (25.414 hektar), penggembalaan /padang rumput 13.414 hektar (8,16%), pekarangan beserta tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya 12.036 hektar (7.32%), tambak 10.203 hektar (6.21%), tanah tanaman kayu-kayuan hutan rakyat 9.048 hektar (5.51%), hutan negara 8.868 hektar (5.40%), tanah yang sementara tidak digunakan 6.068 hektar (3.69%), rawa-rawa yang tidak ditanami 3.389 hektar (2.06%), kolam/tebat/empang 1.740 hektar (1.06%), dan 21.207 hektar digunakan untuk berbagai kepentingan lainnya.

Menurut peta geologi Indonesia, Kabupaten Wajo terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan lidah, yaitu batuan vulkanik, sedimen dan batuan pluton. Sedangkan menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari: (1) Alluvial: Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan, (2) Clay: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla, (3) Podsolik: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua, (4) Mediteran: Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tansitolo, Maniangpajo, Pammana dan Belawa, (5) Grumosol: Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

Selain potensi daratannya, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. Pada wilayah Kabupaten Wajo terdapat 7 (tujuh) sungai yang mengaliri berbagai wilayah kecamatan maupun desa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Bila, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, dan Sungai Awo. Selain sungai, di wilayah Kabupaten Wajo terdapat pula beberapa danau, yaitu danau Tempe (9445 Ha) sebagai danau terbesar di wilayah Wajo, Lapongpakka (1960 Ha), Lampulung (1000 Ha), Buaya (360 Ha), Lapapolo (37 Ha), Penrang riawa (25 Ha), Cenranae (24 Ha), Dori'e (6 Ha). Dari segi penggunaan, potensi sumber daya air yang besar di Kabupaten Wajo dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, irigasi, serta pembangkit tenaga listrik. Selain beberapa manfaat tersebut, beberapa danau juga biasa dimanfaatkan

sebagai penghasil perikanan air tawar maupun tempat tujuan pariwisata, misalnya Danau Tempe.

Menurut peta zone agroklimatologi, iklim di wilayah Kabupaten Wajo dibagi menjadi 5 (lima), yaitu tipe iklim C1,D1,D2,E2 dan E3. Tipe iklim C1 termasuk tipe iklim agak basah dengan curah hujan rata-rata 250 – 3000mm/tahun dan memiliki jumlah bulan basah sebanyak 5-6 bulan/tahun. Tipe iklim D termasuk tipe iklim agak basah dengan curah hujan rata-rata 200 – 250 mm/tahun. Tipe D1dan D2 memiliki 3-4 bulan basah/tahun. Sedangkan tipe iklim E2 dan E3 termasuk tipe iklim kering dengan jumlah basah 0-2 bulan/tahun. Berdasarkan metode Oldeman,bulan basah di Kabupaten Wajo dicirikan dengan banyaknya curah hujan lebih dari 200 mm/bulan yang terjadi pada bulan April dan pada bulan Juli secara berturut-turut (berurutan), sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober dengan Iklim yang tergolong tropis tipe B dan tipe C dengan suhu di antara 29^0C – 31^0C atau rata-rata 29^0C.

3.1.3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang perdagangan dan industry kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan mengadu keberuntungan di daerah ini.

Keadaan penduduk Kabupaten Wajo berdasarkan data tahun 2008 dari Kantor Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum berjumlah 383.504 orang. Penduduk yang paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah yang jumlah penduduknya dengan jumlah yang sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa. Tidak meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan dan masyarakat lebih terpusat pada ibukota disebabkan antara lain kawasan kota dalam hal ini di Kecamatan Tempe masih tersedia lahan yang cukup luas untuk menjadi daerah hunian masyarakat, disatu

sisi kawasan ini dilengkapi prasarana yang cukup berkembang sehingga mendorong sebahagian penduduk terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah utnuk bertempat tinggal di kawasan ini. Kecepatan perkembangan kehidupan di ibukota mampu membantu perbaikan hidup dibandingkan dengan perkebangan di desa, sehingga banyak masyarakat luar kota dating ke ibukota kabupaten untuk mencoba memperbaiki tingkat pendidikan dan kehidupannya di ibukota kabupaten tepatnya di Kecamatan Tempe.

Kondisi ini diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang ada, pola penyebaran penduduk dan tingkat fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota saja, akan tetapi menyebar keseluruh bagian kecamatan dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan tidak berpusat pada satu titik saja.

b. Ketenagakerjaan

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semkain meningkat membutuhkan langkah strategic dalam pemenuhannya, substansi penting dalam hal itu adalah pekerjaan yang menjadi jaminan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.3
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
	SD	10	4	14	0,37
	SMP	27	13	40	1,06
	SMA dan Kejuruan	599	703	1,302	34,47
	Diploma	167	918		28,73
		504	828	1,0	35,27

	Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2)	1	3	85 1,332 4	0,10
	JUMLAH	1,308	2,469	3,777	100,00

Sumber : Dinas PMD Tenaga Kerja Kabupaten Wajo 2010

Jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikannya tergambar pada tabel di atas, bahwa pencari kerja yang berplendidikan SMA dan kejuruan cukup besar sebanyak 34,47%, sebanding dengan pencari kerja berpendidikan S-1. Hal ini dipengaruhi karena banyaknya masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Masyarakat juga pada umumnya lebih memilih kursus keterampilan disbanding dengan melanjutkan pendidikan formalnya ke perguruan tinggi, sebab memilih untuk bekerja bagi masyarakat akan lebih menguntungkan dan lebih menghemat biaya hidup mereka.

Perkembangan dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Wajo secara umum setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada bidang perindustrian dan perdagangan, namun di sisi lain tingkat pertumbuhan pencari kerja tidak berbanding dengan deret hitung dengan lapangan kerja yang tersedia di daerah ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan pendidikan masyarakat lebih dominan rendah dan kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja di Kabuapaten Wajo saat ini yang semakin menuntut akan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini merupakan cirri dari sebahagian besar daerah-daerah yang dalam tahap pengembangan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, sehingga dalam sebuah system tatanan ketenagakerjaan di daerah ini tercatat adanya tenaga kerja produktif dan tidak produktif dimana kedua sisi ini setiap tahunnya mengalami peningkattan yang disebabkan oleh

peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo baik yang berdomisili tetap atau pendududk yang tidak berdomisili tetap di daerah ini yang secara garis besar akan tetap mempengaruhi tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Wajo.

Ditinjau dari kemampuan masyarakat, tingginya angka masyarakat yang tidak produktif ini disebabkan pula oleh pertumbuhan sektor kegiatan industry, perdagangan dan jasa yang belum mampu menyerap semua tenaga kerja, yang umumnya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai. Kondisi ini akan berdampak pada kegianatan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo, sektor ini makin Nampak dan berkembang pada sektor-sektor informal sebagaimana yang banyak terjadi di daerah-daerah yang sedang berkembang di Indonesia.

3.1.4. Sektor Dalam Perekonomian

a. Sektor Pertanian

Tabel 3.4

Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan

No.	Komoditas	Kecamatan
1	Padi Sawah	Seluruh kecamatan
2	Padi Ladang dan Jagung	Seluruh kecamatan
3	Ketela Pohon	Seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Keera
4	Ubi Jalar	Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Takkalalla dan Keera
5	Kacang Hijau	Seluruh kecamatan
6	Kacang Tanah	Seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tempe dan Keera

o.	Komoditas	Kecamatan
	Kacang Kedelai	Sabbangparu, Takkalalla, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Belawa, Gilireng, Keera, Pitumpanua

Sumber : Wajo Dalam Angka 2008

Berdasarkan karakteristik topografi, klimatologi, serta jenis tanah dan batuannya, maka berikut ini akan diuraikan potensi sektor-sektor perekonomian yang terkait dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun budaya di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.5

Kawasan Sentra Produksi Tanaman Perkebunan

o.	Komoditas	Kecamatan
	Kopi Robusta	Sabbangparu, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua
	Kakao	Seluruh Kecamatan
	Lada	Majauleng, Keera, Pitumpanua
	Cengkeh	Keera, Pitumpanua
	Jambu Mete	Seluruh Kecamatan
	Kelapa Dalam	Seluruh Kecamatan
	Kelapa Hybrida	Seluruh Kecamatan
	Pala	Pitumpanua
	Kemiri	Sabbangparu, Pammana, Takkalalla, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua

o.	Komoditas	Kecamatan
0	Kapuk	Seluruh Kecamatan
1	Tebu	Seluruh Kecamatan
2	Panili	Sabbangparu, Majauleng, Gilireng, Keera, Pitumpanua
3	Tembakau	Sabbangparu, Pammana

Sumber : Wajo Dalam Angka 2008

b. Sektor Perdagangan dan Hotel

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Wajo terus dibenahi oleh Pemerintah Daerah, sebab dengan adanya pembenahan yang berkesinambungan pada sektor ini untuk semakin menarik wisatawan dan infestor untuk berbisnis di Kabupaten Wajo.

c. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Wajo yang semakin diperhatikan saat ini dengan dikembangkannya Kabupaten Wajo sebagai kota gas, yang terbukti dengan semakin dikembangkannya tambang gas bumi di Kecamatan Gilireng dan di Kecamatan Pammana di Desa Patila yang digunakan sebagai pembangkit listrik di Kabupaten Wajo dan disebahagian wilayah di Sulawesi Selatan.

d. Sektor Perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Wajo sangat menjanjikan, ini didukung oleh letaknya yang strategis dan semakin banyaknya alat penangkapan ikan yang semakin modern yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Wajo.Perkembangan perikanan di Kabupaten Wajo ditekankan pada pengembangan nelayan yang diarahkan pada peningkatan pengendalian

pengawasan kegiatan perikanan.Pertumbuhan perikanan mengalami peningkatan yang menggembirakan, peningkatan produksi ikan disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan armada penangkapan ikan, serta adanya penyesuaian dan introduksi alat baru.

e. Sektor Industri

Pengembangan industry di wilayah Kabupaten Wajo merupakan sektor penting untuk dikembangkan.Salah satunya adalah sektor industri persuteraan alam dan pertenunan, serta meubel kayu yang merupakan komoditi andalan sektor industri.Sektor industri pertenunan sutera khusunya sangat potensial untuk dikembangkan, kegiatan ini merupakan pekerjaan turun temurun disebahagian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian pokoknya, terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanasitolo yang merupakan pusat industri sutera di Kabupaten Wajo.Hal ini disebabkan karena mereka sudah turun temurun menjadikan pekerjaan ini sebagai penopang kehidupan mereka.Tempat yang strategis ditopang dengan tingkat pengetahuan yang sudah turun temurun diajarkan mengakibatkan wilayah ini dijadikan pusat perindustrian sutera di Kabupaten Wajo.Dengan perkembangan sektor industri sutera diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

f.Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun semakin berkembang.Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah sarana angkutan darat maupun laut. Pemerintah juga semakin membenahi tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan sektor ini seperti pembangunan dua sektor terminal kota. Pada sektor komunikasi yang juga menunjukkan perkembangan berupa telepon dan terdapatnya beberapa warung telekomunikasi, warnet murah, dan kawasan free hotspot di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau. Meskipun saat ini sebahagian besar masih terpusat di Kota Sengkang, namun Pemerintah yang terkait semakin berusaha untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sampai ke daerah-daerah.

g. Sektor Pariwisata

Meliputi wisata alam Danau Tempe di Kecamatan Tempe dan danau-danau lainnya (Lapongpakka, Lampulung, Buaya, Penrang Riawa, Cenranae, Dori'e, Lapollo), Bendungan Kalola, Taman Perburuan Rusa di di Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, agrowisata sutera daun (Kecamatan Sabbangparu), wisata budaya berupa atraksi budaya Maccera Tappareng yang diadakan setiap bulan Agustus, Atraksi Pernikahan Mappacci, Mappanre Lebbe dan Mappasilellung Botting, Kawasan Budaya Rumah Adat Atakkae di pinggir Danau Lampulung (Kecamatan Pammana), Situs Tosora di Kecamatan Majauleng. Untuk ke depannya, bisa dipertimbangkan wisata industri sutera di beberapa kecamatan di Wajo (Tempe, Tansitolo, Sajoangin, Sabbangparu, Pammana).

3.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wajo

3.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berskala nasional, pelaksanaan pembangunan di daerah memegang peranan yang cukup besar, karena pembangunan yang sedang digalakkan di daerah tidak lain adalah sub sistem dari sistem pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersevut maka berdasarkan keputusan presiden no 15 tahun 1974 dibentuklah suatu wadah atau badan yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang ditugaskan untuk mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah serta mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral serta pembangunan lainnya yang dari tahun ke tahun semakin meningkat maka diterbitkanlah keputusan presiden no.27 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II yang masing-masing berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah.

- ✓ **Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai kedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Wajo, yang berfungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Bappeda Kabupaten Wajo dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, serta pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan.

- ✓ **Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana yang telah dikemukakan lebih awal bahwa Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wajo merupakan badan staf langsung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati), maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan penilaian dan pengendalian terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas

Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;

3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro daerah, Arah kebijakan Keuangan Daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang berisi kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;

4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan

5. Penyusunan rencana anggaran pokok dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan unit kerja terkait, dengan koordinasi Sekretaris Daerah;

6. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan.

3.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo yaitu: *"Terwujudnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Lembaga Perencana dan Profesional".*

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga perencanaan yaitu sebagai intitusi yang membidangi perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

2. Profesional yaitu SDM aparatur yang mempunyai nilai kompetensi dalam bidang tugas masing-masing khususnya pengendalian dan perencanaan pembangunan.

Sedangkan pengertian secara umum adalah terwujudnya intitusi Bappeda dengan SDM aparatur yang mempunyai kompetensi merencanakan pembangunan Kabupaten Wajo secara komprehensif.

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Wajo, agar arah dan tujuan pelayanan dapat terealisasi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkualitas, terarah, dan dapat diukur.
2. Mengkoordinasikan perencanaan dengan setiap unsur-unsur yang terlibat / terkait dalam perencanaan pembangunan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Mengadakan penelitian dan pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna maka Bappeda Kabupaten Wajo sebagai suatu organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu secara terorganisir tentulah harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan rapi.

Suatu organisasi pada prinsipnya adalah menghimpun orang-orang untuk bekerjasama dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecenderungan pada sekelompok manusia yang berhimpun pada suatu wadah adalah keinginan untuk bersama dan bekerja secara koperatif untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Wajo, terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Fisik dan Prasarana

- Sub Bidang Pekerjaan Umum, PSDA, dan perhubungan
- Sub Bidang Tata Ruang, dan Tata Guna Tanah

d. Bidang Ekonomi

- Sub Bidang Pertanian
- Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

e. Bidang Sosial Budaya

- Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum

f. Bidang Penelitian dan Statistik

- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Sub Bidang Statistik dan Pelaporan

g. Bidang Perencanaan Makro & Pembiayaan Pembangunan Daerah

- Sub Bidang Perencanaan Makro
- Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai kedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten Wajo yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Wajo..

Tugas dan Fungsi

Sebagaimana yang telah dikemukakan lebih awal bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati), maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas daerah, lembaga teknis daerah dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo sebagai suatu organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu secara terorganisir tentulah harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan rapi.

Suatu organisasi pada prinsipnya adalah menghimpun orang-orang untuk bekerjasama dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecenderungan pada sekelompok manusia yang berhimpun pada suatu wadah adalah keinginan untuk bersama dan bekerja secara koperatif untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Wajo, terdiri dari :

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sub. Bagian Pengawasan, Tugas Perbantuan dan Pemerintahan Desa

Sub. Bagian Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Sub. Bagian Kependudukan, dan Agraria

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- Sub. Bagian Pendidikan dan Kesehatan
- Sub. Bagian Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana
- Sub. Bagian Keagamaan

Bagian Administrasi Kemasyarakatan

- Sub. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
- Sub. Bagian Pemuda dan Olah Raga
- Sub. Bagian Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Administrasi Kerjasama Antar Daerah

- Sub. Bagian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
- Sub. Bagian Kerjasama Pemerintahan dan Kewilayahan
- Sub. Bagian Kerjasama Sosial Budaya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Administrasi Pengembangan Potensi Daerah

- Sub. Bagian Energi Sumber Daya Mineral
- Sub. Bagian Penanaman Modal
- Sub. Bagian Promosi Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan

- Sub. Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik
- Sub. Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
- Sub. Bagian Pekerjaan Umum

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

- Sub. Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Sub. Bagian Peternakan dan Perikanan
- Sub. Bagian Kehutanan dan Perkebunan, dan Lingkungan Hidup

Bagian Administrasi Perekonomian

- Sub. Bagian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Sub. Bagian Perindustrian dan Perdagangan
- Sub. Bagian Badan Usaha Milik Daerah

c. Asisten Administrasi Umum

Bagian Hukum dan Perundang-undangan

- Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
- Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM
- Sub. Bagian Tindak Lanjut

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- Sub. Bagian Kelembagaan
- Sub. Bagian Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
- Sub. Bagian SDM Aparatur

Bagian Umum

- Sub. Bagian Tata Usaha
- Sub. Bagian Perlengkapan
- Sub. Bagian Administrasi Keuangan

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- Sub. Bagian Peliputan dan Pemberitaan
- Sub. Bagian Protokol dan Perjalanan
- Sub. Bagian Santel dan Pengolahan Data Elektronik

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- ✓ **Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Sebagaimana yang telah dikemukakan lebih awal bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, maka Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Wajo sebagai suatu organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu secara terorganisir tentulah harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan rapi.

Suatu organisasi pada prinsipnya adalah menghimpun orang-orang untuk bekerjasama dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecenderungan pada sekelompok manusia yang berhimpun pada suatu wadah adalah keinginan untuk bersama dan bekerja secara koperatif untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Wajo, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum:

- Sub. Bagian Tata Usaha
- Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- Sub. Bagian Kepegawaian

b. Bagian Keuangan

- Sub. Bagian Perencanaan Anggaran
- Sub. Bagian Perbendaharaan dan Belanja
- Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

c. Bagian Perundang-undangan

- Sub. Bagian Produk Hukum
- Sub. Bagian Analisa perundang-undangan
- Sub. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

d. Bagian Risalah dan Persidangan

- Sub. Bagian Persidangan
- Sub. Bagian Risalah dan Notulen
- Sub. Bagian Humas dan Protokol

B. Monografi Danau Tempe, Kabupaten Wajo

Gambaran Umum Wilayah Kawasan Danau Tempe. Kondisi Fisik Wilayah

Letak Geografis

Danau Tempe terletak di Propinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 119°53’ -120°04’ Bujur Timur dan 4°03’ -4°09’ Lintang Selatan. Elevasi permukaan air danau bervariasi antara 3 m pada musim kemarau sampai 10 m dpl saat banjir.Danau Tempe termasuk tipe danau eutropis, yaitu tipe danau yang berbentuk cawan yang datar dengan karakteristik tersedianya lahan pasang surut yang luas di sekitar danau. Danau Tempe terletak pada dataran rendah, yang merupakan tempat menampung air Sungai Bila, Sungai Walennae dan sungai-sungai kecil disekitarnya dengan Sungai Cenranae sebagai satu-satunya sungai yang mengalirkan air keluar dari danau. Wilayah Danau Tempe meliputi wilayah Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.Luas kawasan Danau Tempe 13.750 ha terdiri dari 11.453 ha dalam wilayah Kabupaten Wajo, 1.547 ha dalam wilayah Kabupaten Soppeng dan 750 ha dalam wilayah Kabupaten Sidrap.

Klimatologi danau tempe

Wilayah Danau Tempe relatif kering, curah hujan bulanan rata-rata kurang dari 100 mm. Daerah ini termasuk daerah peralihan antara iklim barat dan iklim timur di Sulawesi Selatan.Musim kemarau terjadi dua kali yaitu pada Bulan Januari, Februari dan Bulan Agustus, September, dan Oktober. Wilayah jangkauan kedua anak sungai utama, yakni Sungai Bila dan Walenae lebih basah, meskipun musim kemarau panjang dan simultandan nyata, karena ketinggian wilayah danau hanya 5-6 meter di atas permukaan air laut. Suhu rata-rata siang hari berkisar antara 34-350C dengan kelembaban sekitar 85-90%.Dengan demikian daerah ini merupakandaerah yang relatif kering dengan kelembaban yang tinggi.

Jenis tanah

Jenis Tanah disekitar Danau Tempe hampir seluruhnya berupa tanah liat yang keras dan padat, dengan sedikit tumpukanpasir di muara sungai.tanah liat yang berada di dasar danau sangat kaya dengan kandungan bahan organik. Penanaman tanaman di daerah pesisir danau selama musim kemarau dihambat oleh struktur tanah yang buruk, yang terdiri atas tanah liat yang berat dan retak sampai bagian dalam.Jenis tanah disekitar Danau Tempe relatif bervariasi, hal ini menunjukkan adanya keragaman faktor pembentuk tanah. Berdasarkan data morfologi, fisika dan kimia serta penelitian sebelumnya terdapat 4 (empat) jenis tanah yaitu :

1)Aluvial Hodromorf, Glei Humus, Aluvial

2)Aluvial Grumosol

3)Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning, Litosol

4)Mediteran Merah Kuning, Litosol

Hidrologi

Secara hidrologi, Danau Tempe, Danau Sidenreng dan Danau Buaya merupakan satu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kedalaman maksimum Danau Tempe terjadi pada musim penghujan sekitar 5 – 6,5 m dan pada musim kemarau sekitar 2 –4 m. Danau Tempe yang berada di sebelah barat Kabupaten Wajo memiliki luas ± 25.000 Ha pada saat air pasang dan seluas ± 9.000 Ha pada saat air surut (musim kemarau).Saat musim hujan, volume air yang mengalir masuk ke danau akan lebih banyak dibandingkan dengan volume air yang keluar melalui Sungai Cenranae. Hal ini terjadi karena terdapat dua sungai besar yang bermuara langsung ke Danau Tempe, yakni Sungai Walennae dan Sungai Bila ditambah beberapa sungai kecil lainnya. Ketika volume air masuk lebih besar darivolume air yang keluar, maka akan mengakibatkan air meluap menggenangi daerah-daerah sekitar Danau Tempe (banjir).Sungai-sungai yang bermuara di Danau Tempe adalah Sungai Bila dari utara, Sungai Walennae dari selatan dan sungai-sungai kecil yang masuk terutama dari arah barat. Air yang masuk ke danau dialirkan keluar melalui Sungai Cenranae menuju arah timur ke Teluk Bone.Aliran air dari sungai-sungai yang masuk ke danau membawa

sedimen yang diendapkan di danau. Erosi cenderung meningkat akibat kerusakanhutan di bagian hulu daerah aliran sungai, menyebabkan terjadinya pendangkalan danau. Berdasarkan hasil penelitian JICA 1980 dan 2009dan beberapa penelitian lainnya, pendangkalan Danau Tempe berkisar antara 1 –10 cm/tahun, bahkan pada sekitar tahun 2012diprediksikan pendangkalan terjadi sekitar 15 cm/tahun. Tercatat dari tahun ke tahun luas daerah yang terkena banjir semakin bertambah, hal ini disebabkan Sungai Cenranae berkelok-kelok (bermeander) dan muaranya semakin mengalami pendangkalan sehingga menghambat aliran air keluar dari Danau Tempe (Laporan Desain Pengembangan Danau Tempe Tahun 2012, Dinas Pengairan). Banjir maksimum akan terjadi pada saat permukaan air Danau Tempe mencapai elevasi lebih dari 10 m dari permukaan laut, sehingga Danau Tempe, Danau Sidenreng dan Danau Buaya menjadi daerah genangan.

Kemiringan Lereng

Di daerah kawasan Danau Tempe kemiringan lereng adalah 0-8% dan 25-45%, untuk lebih jelasnya perhatikan peta berikut ini

Geologi

Di daerah kawasan Danau Tempe berupa Endapan Alluvium dan Formasi Walanae.

Sedimentasi

Sedimentasi Danau Tempe tergantung pada besarnya sedimen yang dibawa sungai yang mengisi danau tersebut.Hal ini pada gilirannya tergantung pada erosi tanah yang terjadi di daerah sumber air sungai tersebut. Proses sedimentasi meliputi erosi, angkutan, pengendapan dan pemadatan dari sedimen tersebut. Proses sedimentasi dimulai dari jatuhnya air hujan yang menghasilkan energi kinetik yang merupakan tahap awal dari proses erosi. Saat tanah menjadi partikel halus, lalu terangkut bersama aliran dan sebagian lagi akan tertinggal di atas permukaan tanah. Partikel yang masuk ke sungai terbawa aliran yang selanjutnya

menjadi angkutan sedimen.Angkutan sedimen tersebut kamudian mengendap di Danau Tempe, menjadikan Danau Tempe dangkal, daya tampung air mengecil dan banjir.

C. Lokus Pemberdayaan

Penelitian ini memilih kelurahan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,Letak GeografisLuas wilayah Kecamatan Tanasitolo ± 154,60 Km, dengan batas administrasi wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan KecamatanManiangpajo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempe dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Majauleng. Kondisi topografi Kecamatan Tanasitolo pada umumnya memiliki permukaan yang datar pada seluruh wilayah Kecamatan Tanasitolo.Kondisi topografi tersebut mempengaruhi aktivitas masyarakat dimana aktivitas sawah lebih dominan[3].

Kecamatan Tanasitolo dilalui Sungai yang besar yaitu Sungai Walanae dan Cenranae.Sungai tersebut memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga listrik, irigasi dan kebutuhan air minum rumah tangga[4].

Kondisi tata guna lahan Kecamatan Tanasitolosecara umum didominasi oleh penggunaan lahan untuk Sawah.Berikut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Tanasitolo.

Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanasitolo terlihat bahwa kepadatan tertinggi berada pada Desa Nepo yaitu mencapai 1.250jiwa/km dan kepadatan terendah berada pada Desa Tonralipue 38jiwa/km. Menurut Jenis Kelamin Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Tanasitoloberdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Dimana jumlah penduduk perempuan terbesar berada di Desa Assorajang dan terendah di DesaTonralipue.

[3] BPS Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka Tahun 2018
[4] BPS Kecamatan Tanasitolo Dalam Angka Tahun 2018

BAB III

PROSES PENDAMPINGAN PEREMPUAN NELAYAN DESAASSORAJANG KEC.TANASITOLO, KABUPATEN WAJO.

Sebagaimana dibahas dalam bab terdahulu bahwa penelitian ini menggunakan participatory action research dengan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Dalam bab ini peneliti memaparkan proses dan hal-hal yang muncul dalam setiap tahap kegiatan sebagai berikut:

A. Perencanaan Kegiatan Pendampingan

Perencanaan dalam program PAR ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan istri nelayan/perempuan nelayan dan stakeholder setelah dilakukan terlebih dahulu observasi dan analisis kebutuhan sehingga kegiatan ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan strategis istri / perempuan nelayan.Wawancara pertama dilakukan kepada masyarakat sekitar Tanasitolo untuk menemukenali profil dari penjual bale bungo , diketahui dari yang dilakukan kepada kedua pimpinan perempuan penjual bale bungo. Sebagaimana yang diketahui dari Dr. Andi Besse Rompe Gading yang merupakan salah satu Dosen Puangrimagalattung bahwa

”Pengusaha bale bungo yang terdapat di Tanasitolo masih sangat minim Ilmu memasarkan Produk Usaha, apalagi dalamm hal mendesain kemasan produk usaha, padahal usaha Bale Bungo yang dijadikan produk ikan kertas merupakan usaha yang punya potensi meningkatkan perekonomian daerah”

SelanjutnyaMelalui wawancara mendalam dengan masing-masing kelompok perempuan bale bungo kami akhirnya merangkum kedalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Secara umum sumber daya manusia (SDM) kalangan perempuan secara kuantitatif lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, karena jumlah angka kelahiran yang sangat berbeda.
2. Kelompok pemberdayaan perempuan telah didirikan beberapa tahun yang lalu, tetapi program tidak berjalan secara maksimal.

3. Belum terdapat komunitas yang secara khusus menyatukan istri-istri nelayan bale bungo

4. Sebagian perempuan nelayan Kelurahan Tanasitolo berada pada kelas ekonomi rendah sehingga sebagian remaja tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka memilih bekerja membantu orang tua dan sebagian lagi masih pengangguran dan belum dibina dengan baik. Biasanya mereka mencari alternatif denganbekerja serabutan, tidak tetap tidak dapat menjamin kehidupan ekonomi yang layak yang diistilahkan dengan keluarga prasejahtera.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Penelitian menggunakan metode PAR yang bercirikan partisipatif dan menggunakan siklus dampingan, peneliti memberikan peluang yang cukup kepada Perempuan Nelayan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan. Melalui kegiatan dalam beberapa siklus ini diharapkan Perempuan Nelayan mampu mengubah diri dari Perempuan yangminim inovasi dan kreatifitas menjadi Perempuan yang berkualitas. Berdasarkan prioritas pilihan jenis kegiatan di atas, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara periodik, dan terpisah antara kegiatan bagi pendampingan perempuan nelayan dan Pendampingan perempuan penjual Bale Bungo

1. Pendampingan Perempuan Nelayan

Siklus pertama: Diskusi peningkatan wawasan masalah Perempuan dalam setting budaya masyarakat miskin perkotaan memiliki karakteristik yang spesifik. Masalah individualistik dan relasi yang terbangun dalam kehidupan masyarakat patembayan menjadikan kalangan perempuan di Kelurahan Tanasitolo. Diskusi peningkatan wawasan perempuan diharapkan mampu memberikan penmahaman kepada perempuan untuk bangkit dan mampu bersaing di era Kompetisi yang semakin kompleks ini. Berangkat dari pengalaman mereka, hal-hal yang menarik dalam hidup mereka dan bagimana mereka memiliki sikap kritis dalam menyikapi masalah serta mampu memotivasi diri untuk menjadi perempuan yang kreatif dan memiliki jati diri yang kuat.

Proses Memberdayakan Perempuan Nelayan Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Ikan Bungo (*oxyeleotris marmorata*) merupakan jenis ikan unik yang hanya terdapat di Danau Tempe. Karena keunikan tersebut, ikan Bungo sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai produk khas kota Sengkang. Disisi lain, ikan bungo tidak hanya unik, namun digemari baik oleh Penduduk di Kabupaten Wajo, namun juga digemari oleh penduduk daerah lain. Karena itu, majalah GeoMagz pada 2015 yang lalu memberikan ulasan bahwa ikan ini berpotensi menjadi salah satu sumber penghasilan daerah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan.Namun, mitra tidak memiliki konsep yang jelas dan dapat diwujudkan menjadi suatu gerakan bersama. Karena itu, PKM ini akan diarahkan untuk mendesain suatu produk bersama secara partisipatif, produk tersebut nantinya yang akan dikembangkan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada dasarnya Ide untuk mengolah ikan bungo menjadi produk oleh-oleh ikan bungo khas kota Sengkang sudah menjadi wacana dikalangan perempuan nelayan Mattirotappareng. Akan tetapi, beberapa situasi membuat gagasan tersebut sulit untuk mereka wujudkan, yaitu:

1. Kelompok tidak mengetahui standar kualitas produk oleh-oleh pada umumnya. Apalagi jika produk tersebut adalah ikan kering.
2. Kelompok tidak mengetahui cara mendesain kemasan yang menarik bagi konsumen.
3. Kelompok Perempuan nelayan tidak mengetahui cara mengoptimalkan fungsi internet, khususnya sosial media dan situs jual beli online untuk digunakan sebagai media pemasaran.
4. Kelompok Perempuan tidak mengetahui cara membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) untuk mengembangkan produk oleh-oleh Ikan Bungo khas Sengkang.

Dalam kajian tentang pembangunan ekonomi, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk mangantar suatu masyarakat mengikuti proses dimana dengan proses tersebut masyarakat dapat sampai ketahap kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya yang dianggap kurang baik atau tidak baik. Namun, kehidupan yang lebih baik tidak dapat diukur hanya dari satu indicator semata.ada banyak indicator-indikator untuk mengukur suatu kehidupan dianggap baik atau tidak. Ekonomi hanya salah satunya.Hal in tentu saja beriimplikasi pada persepsi masyarakat yang berbeda.Misalnya, suatu masyarakat bisa jadi sudah menganggap kehidupannya yang sekarang lebih baik, tapi jika dibandingkan dengn masyarkaat lainnya, ternyata belum dapat dikatakan lebih baik[5].

Tujuan utama dari suatu program pembangunan ekonomi adalah bagaimana suatu masyarakat dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Kemandirain yang dimaksud dapat dilihat pada aspek keuangan, kepemilikan materi, akses kepada sumber daya ekonomi, akses kepada pemerintah, akses kepada kesehatan dan Pendidikan dan akses kepada komunitas sosial. Dengan kata lain, kesukses pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan masyarakat memnuhi kebutuhan primer hidupnya, tapi sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan sosial dalam menunjang hidupnya.

Kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana suatu masyarakat memiliki kemampuan dalam memutuskan serta melakukan pekerjaan yang dianggap tepat dalam memenuhi dan memeahkan berbagai persoalan-persoalan hidup yangdihadapi setiap hari dengan menggunakan kammpuan intelktual mereke sendiri.kemampuan intelektual yang dimaksud terdiri dari kemampuan kognifit, konotatif, psikomotorik, afektif, serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

---

[5] Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Edisi I, (Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997), 116.

Untuk sampai kepada kemandirian masyarakat, tentu dibutuhkan suatu proses Pendidikan yang baik. Masyarajat yang memiliki dan mengikuti proses Pendidikan yang baik, perlahan-lahan akan memiliki kekuatan intelktual yang dapat dijadikanfondasi dalam mengambil keputusan yang bermanfaat. Menurut Sumudiningrat (2000)[6], intelaktualitas masyarakat dapat ditandai dengan lahirnya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok (komunitas) masyarakat yang terbelakang atau tidak memiliki daya dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Target utama suatu program pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahtraan dirinya dan keluarganya melalui penggunaan sumber daya yang ada.

Akan tetapi, untuk membangun kemandirian ekonomi bukan perkara yang mudah, dibutuhkan metode peberdayaan yang terukur dan efektif.Serta proram pemberdayaan tidak dapat dikerjakan hanya dalam hitungan bulan, dibtuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendampingi masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.Untuk itu, pelibat pemerintah desa dalam program pendampingan sangat dibutuhkan.Karenna kedepannya, jika suatu program pemberdayaan berhasil melahirkan kemandirian ekonomi, maka program tersebut dapat dilanjutkan oleh pemerintah desa untuk direplikasi pada komunitas mayarakat lainnya.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri[7]. dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan hinga proses monitoring dan evaluasi program pembangunan. Kemandirian, tidak hanya bermakna mampu

[6] Sumudiningrat, G., Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000)
[7]Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat

hidup sendiri, tapi kemandirian juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memberikan pendapatan, kritikan dan kemampuan menolak program pembnagunan yang merugikan masyarakat.

Melalui penjelasan diatas, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (sumber daya) suatu komunitas mayarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai upaya menaikkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawha yang selama ini termarginalkan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial.Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selalui diidentiikan dengan pemberdayaan masyarakat kelas bawah.

Pemberdayaan pada umumnya ditijukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, yang dapat berimplikasi pada peningkayakn pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdyaan ekonomi dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keterampilan usaha serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. hal tersebut dilakukan melalui proses pelatihan-pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyuluhan serta kegiatan lainnya[8].

Dalam kajian tentang pembangunan ekonomi, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk mangantar suatu masyarakat mengikuti proses dimana dengan proses tersebut masyarakat dapat sampai ketahap kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya yang dianggap kurang baik atau tidak baik. Namun, kehidupan yang lebih baik tidak dapat diukur hanya dari satu indicator semata.ada banyak indicator-indikator untuk mengukur suatu kehidupan dianggap baik atau tidak. Ekonomi hanya salah satunya.Hal in tentu saja beriimplikasi pada persepsi masyarakat yang berbeda.Misalnya, suatu masyarakat bisa jadi sudah menganggap kehidupannya

[8]Sumber: Yayasan SPES, Pengembangan Berkelanjutan, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), 245.

yang sekarang lebih baik, tapi jika dibandingkan dengn masyarkaat lainnya, ternyata belum dapat dikatakan lebih baik[9].

Tujuan utama dari suatu program pembangunan ekonomi adalah bagaimana suatu masyarakat dapat hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Kemandirian yang dimaksud dapat dilihat pada aspek keuangan, kepemilikan materi, akses kepada sumber daya ekonomi, akses kepada pemerintah, akses kepada kesehatan dan Pendidikan dan akses kepada komunitas sosial. Dengan kata lain, kesukses pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan masyarakat memnuhi kebutuhan primer hidupnya, tapi sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan sosial dalam menunjang hidupnya.

Kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana suatu masyarakat memiliki kemampuan dalam memutuskan serta melakukan pekerjaan yang dianggap tepat dalam memenuhi dan memeahkan berbagai persoalan-persoalan hidup yangdihadapi setiap hari dengan menggunakan kammpuan intelktual mereke sendiri.kemampuan intelktual yang dimaksud terdiri dari kemampuan kognifif, konotatif, psikomotorik, afektif, serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Untuk sampai kepada kemandirian masyarakat, tentu dibutuhkan suatu proses Pendidikan yang baik. Masyarajat yang memiliki dan mengikuti proses Pendidikan yang baik, perlahan-lahan akan memiliki kekuatan intelktual yang dapat dijadikanfondasi dalam mengambil keputusan yang bermanfaat. Menurut Sumudiningrat (2000)[10], intelaktualitas masyarakat dapat ditandai dengan lahirnya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok (komunitas) masyarakat yang terbelakang atau tidak memiliki daya dalam mengakses sumber

---

[9] Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Edisi I, (Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997), 116.

[10] Sumudiningrat, G., Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000)

daya ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Target utama suatu program pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya melalui penggunaan sumber daya yang ada.

Akan tetapi, untuk membangun kemandirian ekonomi bukan perkara yang mudah, dibutuhkan metode peberdayaan yang terukur dan efektif.Serta proram pemberdayaan tidak dapat dikerjakan hanya dalam hitungan bulan, dibtuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendampingi masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.Untuk itu, pelibat pemerintah desa dalam program pendampingan sangat dibutuhkan.Karenna kedepannya, jika suatu program pemberdayaan berhasil melahirkan kemandirian ekonomi, maka program tersebut dapat dilanjutkan oleh pemerintah desa untuk direplikasi pada komunitas mayarakat lainnya.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri[11]. dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan hinga proses monitoring dan evaluasi program pembangunan. Kemandirian, tidak hanya bermakna mampu hidup sendiri, tapi kemandirian juga dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memberikan pendapatan, kritikan dan kemampuan menolak program pembangunan yang merugikan masyarakat.

Melalui penjelasan diatas, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan (sumber daya) suatu komunitas mayarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai upaya menaikkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawha yang selama ini termarginalkan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial.Oleh karena itu,

[11]Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat

pemberdayaan masyarakat selalui diidentiikan dengan pemberdayaan masyarakat kelas bawah.

Pemberdayaan pada umumnya ditijukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, yang dapat berimplikasi pada peningkayakn pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdyaan ekonomi dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keterampilan usaha serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. hal tersebut dilakukan melalui proses pelatihan-pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyuluhan serta kegiatan lainnya[12].

Ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan oleh para ahli. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pemberdayaan yang dirumuskan oleh Routhman (2000), yaitu:

1. Model Pengembangan Lokal

Dalam model pengembangan lokal, suatu program pendampingan memiliki kemungkinan berhasil jika semua elemen masyarakat (komunitas yang didampingi) termasuk para stakeholder terlibat dalam proses pendampingan. \

2. Model Perencanaan Sosial

Model perencanaan sosial bertujuan secara khusus untuk menemukan akar permaslahaan dan solusi pemecahana masalah terhadap masahalah sosial yang ada.Seperti persoalan kenanakalan remaja, pemukiman kumuh, anak jalanan, masyarakat marginal dan sejumlah permasalahan sosial lainnya. Model pemberdayaan jenis ini, tidak secara langsung menyentuh ke aspek ekonomi masyarakat, namun lebih mengarah pada masalah komunal seperti yang dijelaskan diatas.

3. Model Aksi Sosial.

[12]Sumber: Yayasan SPES, Pengembangan Berkelanjutan, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), 245.

Model ini lebih menekankan pemberdayaan masyarakat dalam aspek partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk didalamnya politik anggaran. Tujuan utama dari model pemberdayaan ini adalah mengadakan perubahan fundamental pada kelembagaan sosial masyarakat yang pada umumnya enggan terlibat aktid dalam proses politik. Target akhir dari model pemberdayaan ini adalah adanya pemerataan kelembagaan kekuasaan, yang selama ini hanya dikuasai oleh para elite dan keluarganya.

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya berangkat dari paradigm holistic, yaitu cara pandang yang melihat masalah masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. konsep pemberdayaan pada dasarnya berbeda dengan penelitian sosial pada aspek bagaimana memahami permasalahan masyarakat. Penelitian sosial cenderung memandang masalah dengan sudut pandang parsial, yautu hanya melihat dari satu sisi semata.

Salah satu konsep pemberdayaan masyarakat dirumuskan oleh Sumodiningrat (2000)[13] yaitu sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki penduduk terbesar ketiga didunia. Jika konsep perekonomia rakyat dijadikan sebagai standar perekonomian nasional. Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi perekonomian tertinggi didunia.

2. Pemberdayaan Ekonomi rakyat. Adalah setiap usaha untuk menjadikan ekoonomi yang kuat, besar dan modern. Untuk mencapai konsep ini, maka diperlukana perubahan pada tataran structural, karena pada dasarnya yang menjadi kendala utama berkembangnya perekonomian rakyat, adalah sturkurt ekonomi yang sangat didominasi oleh korporasi baik korporsi asing maupun korporasi adalam negeri. Dengan adanya perubahan structural pada aspek ekoonomi dan budaya, maka perekonomi manasyarajat dapat beralih dari perekonomian tradisonal menjadi perekonomian modern, dari ekonomi lemah (terbelakang) ke ekonomi kua (maju) dan dari ekonomi feudal ke ekonomi pasar.

[13] Sumudiningrat, G., Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000)

Untuk mecancapai perubahan strukutral yang dimaksud, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Pengalokasian sumberdaya untuk pemberdayaan masyarakat

b. Penguatan kelebagaan ekonomi dan sosial masyarajat

c. Transfer keterampilan tekhnoloigi kepada masyarakat

d. Pemberdayaan masyarakat dalam hal penginkatan kapasitas sumberdaya

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup dengan meningkatkan produktiftas, namun yang paling fundamental dari pembedayaan ekonomi masyarakat adalag memberikan peluang dan akses yang smaa kepada semuat masyarakat untuk melakukan usaha produktif dan mendukung usaha dengan alokasi modal yang mudah, dan yang paling penting adalah terbangunnya kelembagaan masyarakat yang dapat mewadahi terjadinya transfer pengetahuan antara masyarakat yang sudah berhasil diberdayakan dengan masyarakat yang masoh dalam tahap pemberdayaan.

Pada umumnya, terdapat empat strategi pemberdayaan masyarakat[14], yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dengan cepat melalui penginkatan produktifitas, peningkatan konsumsi dan peningkatakan investasi masyarakat khusnya yang ada dikawasan pedesaan. Pada awalnya model ini dianggap efektif dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek kemandirian ekonomi, akan tetapi karena telalu berorientasi pada aspek eknomi, model ini cenderung abai terhadap factor-faktor budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang pemberdayaan model ini menciotakan konflik-konflik terkait penguasaan terhadap sumber daya ekonomi.Oleh karena itu, model ini kemudian dikembangkan lebih holistic.

2. Strategi Kesejahteraan.

[14] Sumudiningrat, G., Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000)

Strategi ksesejahteraan pada umumnya adalah staregi yag dipakai oleh pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam bentuk pemberian santunan, beras miskin, pelayanan kesehatan dan Pendidikan gratis dan berbagai fasilitas lainnya.Akan tetapi, karena pemberdayaan ini tidak diikuti dengan penguatan pada aspek kemandirian ekonomi masyarakat, menyebabkan timbulnya kebergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang sangat berlebihan sehingga masyarakat cenderung kurang kreatife dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi.

3. Konsep pemberdayaan holistik

Melihat kegagalan-kegagalan dua staretgi pemberdayaan yang dijelaskan diatas, maka dilahirkan suatu startegi pemberdayaan yang tidak kerjakan secara parsial tapi secata menyeluruh dengan melihat setiap factor yang berpengaruh terhadap perkembangan dinamika sosial masyarakat. Strategi ini mensinergikan secara sistematis setiap komponen yang diperlukan dalam melaksanakan pemberdayaan.

Program pengabdian masyarakat akan menerapkan konsep-konsep komunitas untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat khususnya di Desa Assorajang, Kabupaten Wajo. Olehnya itu perlu dilakukan pendekatan pada komunitas maupun keluarga sebagai dasar dalam pemberian pelayanan utama pada masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 17 Oktober 2019 di Desa Assorajang, Kabupaten Wajo. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan meliputi *survey* wilayah binaan, pengkajian awal (pengumpulan dan pengolahan data), perencanaan intervensi, implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya fokus kepada bentuk layanan di lingkup komunitas tetapi juga memberikan bentuk asuhan kepada di keluarga yang terdapat di wilayah Desa Assorajang. Keluarga yang menjadi sasaran untuk dibina khususnya adalah keluarga nelayan.

Adapun kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaporkan adalah tahap persiapan dan pelaksanaan. Persiapan meliputi persiapan kemasyarakatan dan persiapan tekhnis sedangkan tahap pelaksanaan terdiri dari pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

1. Persiapan Kemasyarakatan

Pada awal bulan Juli 2019, melaksnakan observasi awal pada lokasi dampingan..

Pada tahap awal, Tim Pelaksana mulai melakukan pengkajian dan pengumpulan data melalui data sekunder dan data primer melalui survey langsung kepada warga Desa Assorajang kabupaten wajo.

2. Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang dilakukan Tim Pelaksana meliputi melakukan pendataan dan pembagian tugas, mempersiapkan format pengkajian, daftar hadir peserta penyuluhan, pre planing kegiatan, Satuan acara Penyuluhan (SAP), mengidentifikasi Desa Assorajang Kabupaten Wajo

Tim Pelaksana melakukan pengumpulan data dengan mengisi lembar observasi (pada lampiran) dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada kepala keluarga..

A. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri atas Pengkajian, Penentuan Masalah Kesehatan, Perencanaandan Implementasi serta Evaluasi

1. Pengkajian

a. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data yang dilakukan meliputi:

1) Melakukan pengumpulan data dengan cara mengunjungi masing-masing rumah penduduk, wawancara langsung kepada pihak keluarga, serta observasi kondisi rumah dan sekitarnya. Wawancara ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja.
2) Melakukan tabulasi data dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan

b. Hasil tabulasi data dan analisa data

Setelah pengumpulan data, maka data tersebut ditabulasi dalam bentuk tabel. Pengolahan data mencakup analisa masalah kesehatan yang ada di masyarakat Desa Assorajang Kabupaten Wajo

2. Penentuan Masalah

Dari hasil analisa data, ditemukan beberapa masalah desa Assorajang

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pemanfaatan tekhnologi ,pengolahan potensi desa dan pentingnya kerja tim.
b. Tidak adanya kegiatan olahraga secara terstruktur yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

3. Perencanaan

Perencanaan kegiatan tergambar sesuai *Planning Of Action*

4. Implementasi

Berdasarkan perencanaan tersebut pada *Planning Of Action*, maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan

5. Evaluasi

Evaluasi kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan

Adapun langkah-langkah yang d tempuh mengikuti skema proses seperti dibawah ini;

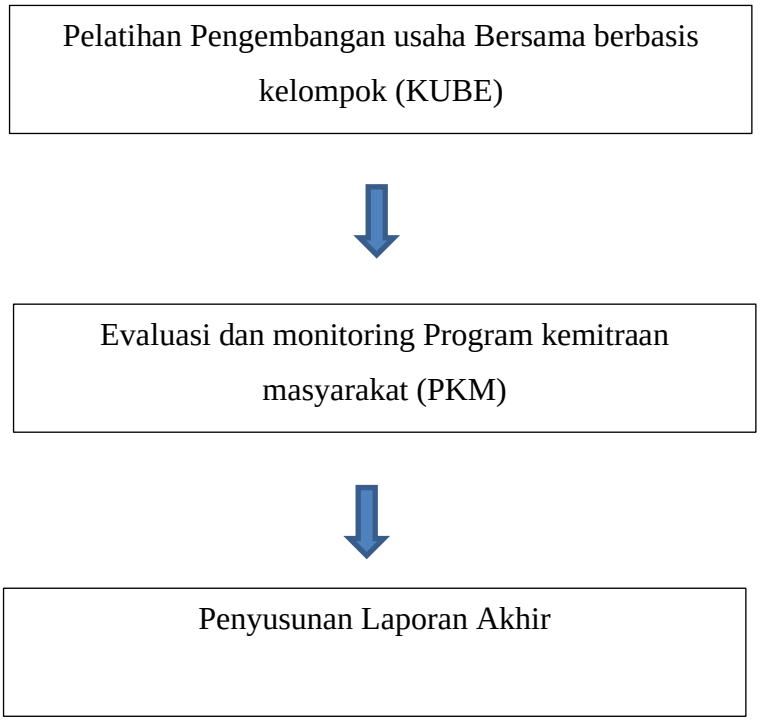
Pelatihan Pengembangan usaha Bersama berbasis kelompok (KUBE)
Evaluasi dan monitoring Program kemitraan masyarakat (PKM)
Penyusunan Laporan Akhir

BAB IV

PERUBAHAN DAN HASIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN BALE BUNGO , DESA ASSORAJANG, KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

Pengabdian masyarakat adalah suatu gerakan proses pemberdayaandiri untuk kepentingan masyarakat. Pengabdian masyarakat seharusnyabersifat kontinual dan jangka panjang karena dalam membangun sebuahmasyarakat dibutuhkan proses yang panjang. Banyak aspek yang harus disentuh untuk menjadikan suatu masyarakat itu baik, karakternya,budayanya,sampaipola pikirnya jugaharuskitasentuh untuk benar-benar menciptakan sebuah masyarakat yangberadab.

Bentuk pengabdian masyarakat jugavariatif, tak selalu terpaku padabakti sosial kilat dengan sembako seadanya sepertiyang dilakukan partai-partaipolitik menjelang pemilu. Menyelenggarakan pendidikan gratis ataumemberdayakan sumber daya manusiasuatu daerah, bahkan membeliproduk lokal juga merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat.Suatu gerakan pemberdayaan masyarakat apapun bentuknya adalah bagian dari pengabdian masyarakat.Seperti halnyadengankegiatanpenelitian iniadalah suatucontoh bentukpengabdiankepada masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang telah dirumuskan peneliti guna pemberdayaan masyarakat antara lain

1. Membentuk Komunitas Istri Nelayan

Pada awal mulanya kami turun kelokasi kegiatan, kami mewawancarai Perempuan nelayan yang terdapat dilokasi Pengabdian, tepatnya di Desa Assorajang, Tanasitolo. Terdapat 2 Komunitas penjual bale bungo yang kami temukan di tempat menjajakan bale bungo tersebut antara lain; komunitas berkah dan komunitas perempuan kecamatan tempe. Komunitas ini terbagi berdasarkan desa tempat mereka bertempat tinggal.

"Disini tidak semuanya istri nelayan, banyakan yang menjual saja, tidak ada komunitas yang menyatukan istri nelayan, saya istri nelayan dan disini tidak

semua istrinya nelayan , ada yang beli ikan langsung sama nelayan.[15]

Setelah berkomunikasi dengan ibu sinta dan ibu umi, kami mencoba untuk mendesain kegiatan FGD untuk mempertemukan kami dengan para perempuan nelayan. Melalui kegiatan itu , ibu sinta terpilih sebagai Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Malebbi dengan jumlah anggota sebanyak 12 orang.

2. Pelatihan Keterampilan

Untuk mempererat tali silaturarahim antar anggota komunitas malebbi kami mencoba mencari tau minta dari subyek dampingan, Ketertarikansubyekdampinganterhadapkewirausahaanberawal dari diskusi pertamabahwamerekamemerlukan upaya-upayauntukmengubah dirimerekadari ketertinggalan,alienasidalam kehidupanmasyarakatperkotaan,pengangguranyang tidakproduktif danlemahnyasemangatmerekauntukbisamandiri.Pendampingan yang dilakukan ini mencoba untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar memilikikesadaranuntukmengubahrealitassosialmereka.Perubahansosialdan rekayasayangdilakukaninidiharapkandapatmeberikan semngat dalam kewirausahaan sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

Upaya untuk mengatasi atau meminimalisir masalah ini, salah satu strateginyaadalahdengan mengenalkanketerampilan.

Pemberdayaan ibu-ibu diKelurahan Tanasitolo melalui kegiatan pengelolaan hasil bumi desaTanasitolo bekerjasama

Pada mulanya peneliti melihat kondisi alam lokasi pemberdayaan yang juga banyak ditumbuhi oleh pohon pisang. Namun,setelah bertanya kepada masyarakat tentang jantung dari pohon tersebut ternyata masyarakat khususnya ibu-ibu disana tidak mengetahui bahwa jantung dari pohon pisang tersebut bisamenjadi menu makanan yang apabila diolah menjadi sangat enak dan bernilai jual. Biasanya, mereka hanya menjadikan jantung pisang campuran sayur dedaunan .Maka dari itu, kami melaksanakan pelatihan untuk ibu-ibu diKelurahan Tanasitolo berupa pelatihan pembuatan Nugget jantung Pisang olahan ikan. Diharapkan nantinya

[15] Wawancara dengan ibu sinta tanggal 3 Oktober 2019

pelatihan tersebut dapat menjadi bekal untuk ibu-ibu diKelurahan Tanasitolo untuk bisa memanfaatkan asset yang mereka miliki, salah satunya adalah buah pohon pisang.Kegiatan ini sangat disambut baik oleh masyarakat khususnya ibu-ibu diKelurahan Tanasitolo karena selain bisa dikonsumsi, jugabisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat disana untuk bisa meningkatkan kesejahtraan hidup mereka. Pelatihan pembuatan nugget jantung posing dari olahan ikan terlebih dahulu dilaksanakan dengan menyiapkan bahan baku 2 hari sebelumpelaksanaan pelatihan,bahan baku yakni buah pohon pisang kami ambildarikebunbeberapa masyaraka dengan bantuan dari beberapa pemuda setempat. Buahjantung pisangyang digunakan adalah buah yang tidak terlalu muda dantidakterlalu tua,hal itu dilakukan agar mendapatkan tekstur nugget yang baik.Pada saat hari pelaksanaan program tersebut, ibu-ibu diKelurahan Tanasitoloberkumpul di salah satu rumah penduduk di Kelurahan Tanasitolo untuk menerima materi pelatihan sekaligu slangsung mempraktikkan pembuatan kolang-kaling. Merekasangat antusias mulai dari awal kegiatan sampai selesai.Pelatihan inidilakukan dengan cara menjelaskan terlebih dahulu tahap-tahap pembuatan nugget jantung pisang, kemudian menuju praktik langsung pembuatan kolang-kalingbersama ibu-ibu diKelurahan Tanasitolo.

Sebelumpelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat belum mampu melihat asset berharga yang ada disekitar mereka yang bisa dimanfaatkan sehingga setelah pelaksanaan pelatihan terjadi Perubahan yang sangatmencolok karena mereka telah mempunyai keterampilan dalam pembuatan kolang-kaling. Sehingga, ketika bulan Ramadhan mereka bisa memanfaatkan momen tersebut membuat nugget jantung pisang untuk dijual. Dan hal itu akan membuat mereka menjadi masyarakat yangproduktif.

3. Sosialisasi Desain Kemasan Produk Usaha Bale Bungo

Mengingat bale bungo merupakan produk yang langka dan memiliki banyak peminat di kabupaten Wajo, maka tim peneliti mencoba membantu subyek dampingan agar dapat menjajakan produk bale bungo ini tidak hanya didalam kabupaten wajo, tapi diluar kabupaten tersebut. Salah satu caranya dengan mengemas ulang produk bale bungo dengan terlebih dulu membantu

pengurusan Izin Dinas Kesehatan , ouput kegiatan ini , usaha bale bungo mendapatkan nomer izin DEPKES RI-P-IRT No. 2027313010126-20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi Masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya di diKelurahan Tanasitolo sebagai lokus dampingan antara lain bahwa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pengangguran.Lemahnya pemahaman keterampilan masyarakat menyulitkan masyarakat dalam membangun jati diri dan kemandirian ekonomi. Praktik keagamaan yang masih minim karena dakwah dimasyarakat masih banyak yang tidak kontekstual, sehingga kehilangan makna.Demikian pula kurangnya kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan nelayan bugo disebabkan ketidakpahaman pengelola dalam model pelatihan yang baik dalam pemberdayaan

Dalam rangka mengubah kondisi masyarakat diKelurahan Tanasitolo yang' miskin' ,baik secara materi maupun moral ini, digunakan metode PAR (*ParticipatoryActionResearch*). Dengan metode ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat agar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masyarakat serta problematikanya,menemu kenali faktor penyebab problem masyarakatdan alternatif solusinya, menyusun strategi dan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan masyarakat, menyusun rencana aksi berdasarkan prioritas, dan keberlanjutan program melalui tahapan-tahapanhinggamencapai targetyang diharapkan dimulai dari tahap inkulturasi, Membangun kesepahaman para Stakeholders Desa, Menganalisis penyebab masalah kemiskinan di desa, menyusun rencana pemecahan Masalah melalui FGD, mengorganisir Potensi Desa melalui FGD , workshop/Pelatihan dan melaksanakan aksi program pemecahan masalah kemiskinan melalui Pemberdayaan Perempuan. Output dari kegiatan pendaampingan berupa produk keterampilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pendampingan diKelurahan Tanasitolo, kecamatan Kabupaten Wajo, maka terdapat beberapa rekomendasi;

1. Diharapkan pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perempuan diKelurahan Tanasitolo melalui pembinaan dan penyediaan anggaran khusus sebab mereka merupakan asset masa depan bangsa.

Secara umum masyarakat memiliki karakteristik yang sama. Mereka memiliki harapan, cita-cita, masa depan ,potensi-potensi sebagai modal dasar untuk dibina dan dikembangkan. Namun karena kondisi kemiskinan telah menjadikan mereka sebagai masyarakat tidak bermakna menyebabkan konsep diri mereka rendah , merasa teralienasi dari lingkungan kota yang tidak ramah, terutama stigma negative terhadap remaja miskin perkotaan semakin memperpuruk kondisi mereka sebagai warga masyarakat yang kehilangan kebermaknaan hidup. Karena itu remaja miskin perkotaan perlu memperoleh pendampingan khusus dari berbagai pihak terkait dengan pendekatan buttom up, partisipatoris, memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan jati diri sebagai generasi yang siap mengadapi tantangan masa depan, agar tidak lagi dipandang sebagai biang kriminalitas dan sampah masyarakat yang harus disingkirkan.

2. Hendaknya penelitian maupun pengabdian dimasyarakat mengambil prioritas menyeleseikan masalah kemiskinan di Indonesia masih terus menjadi masalah utama. Dengan pendampingan melalui perguruan tinggi diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dimasa yang akandatang.

3. Kelompok Istri nelayan bale bungo seharusnya berperan aktif dalam pengembangan keterampilan masyarakat lewat pengadaan berbagai pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan hajat hidup masyarakat. Peningkatan Kualitas SDM ini diharapkan dapat mengentaskan mereka dari ancaman kemiskinan secara struktural maupun kultural.Karenaitu diperlukan kesadaran kolektif untuk bersinergi dengan masyarakat dalammengatasimasalahini.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Analisa anggaran dan Pelaksanaan APBD-Setjen DPR RI. 2014.

Chambers,Robert. PRA Memahami Desa Secara Partisipatif, (Yogyakarta : KANISUS, 1996).

Data Badan Pusat Statistik Indonesia Permaret 2016.Sumber; https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat

Kurniawan, 2015, Peranan badan usaha milik desa dalam peningkatan pendapatan asli desa, Jurnal FISIP Universitas Maritim Raja Hilahi.

Mardimin "Dimensi kritis proses pembangunan di Indonesia", Gramedia Pustaka utama, 1996 Hal 24

Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Edisi I, (Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997), 116.

Rambo Cronika Tampubolon,https://www.bantuanhukum.or.id/web/participatory-action-research-par/

Sumudiningrat, G., Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000)

Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa Nomor 24 Tahun 2016.

Yayasan SPES, Pengembangan Berkelanjutan, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), 245.

Zulkarnaen, 2016, Pengembangan Potensi Ekonomi desa melalui badan Usaha milik desa pondok salam Kabupaten Purwakarta, Jurnal aplikasi Ipteks untuk masyarakat, Volume V: no 1 Mei: 1-4.